PROGRAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: STUDI KASUS IMPLEMENTASI DAN PERBANDINGANNYA

Fritz Gamaliel[1], P. Yudi Dwi Arliyanto[2]

[1]Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik META Industri Cikarang, [2,]Program Studi Teknik Industri, Politeknik META Industri Cikarang

Jln. Inti 1 Blok C1 No 7 Lippo Cikarang 17530
[1]fritzgamaliel@gmail.com, [2] yudi@politeknikmeta.ac.id

Abstract

The head office has issued a data protection program to be implemented by its branch offices as an effort to ensure the protection of the data they manage. The data protection officer holds the main responsibility for ensuring the effective implementation of the data protection program. Therefore, this study explores the implementation of the data protection program at the branch office and compares it with other existing approaches. The methods used in this study are field research and a review of literature relevant to the research. The study finds that the implementation of the data protection program encounters several challenges. One significant challenge is the inconsistency between the head office's policies and the operational practices at branch offices. Additionally, there is a difference in perspective between the data protection officer and management regarding the implementation of the data protection program stemming from the fact that the branch office have been operating since 1999 while the head office formalize the data protection framework in mid-2023. This study also demonstrates that similar studies in previous literature have not provided a comprehensive examination of the data protection programs. Based on these findings, the researchers encourage consistent and continuous testing of compliance with data protection programs to ensure that data protection programs operate more effectively, one of which through polygraph-based testing.

Keywords : *information security, data protection program, nonprofit organization, data privacy*

Abstrak

Kantor pusat mengeluarkan program perlindungan data untuk diterapkan oleh kantor-kantor cabangnya sebagai upaya menjamin perlindungan terhadap data-data yang dikelolanya. Petugas perlindungan data adalah yang paling bertanggungjawab atas terlaksananya program perlindungan data. Penelitian ini bertujuan menguraikan pelaksanaan program perlindungan data tersebut secara menyeluruh di tingkat kantor cabang dan kemudian membandingkannya dengan program perlindungan data yang ada di luar sana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi literatur-literatur terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlindungan data menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatannya adalah ketidaksesuaian antara kebijakan kantor pusat dan praktik di lapangan kantor cabang. Selain itu, terdapat perbedaan sudut pandang antara petugas perlindungan data dan pimpinan terkait implementasi program perlindungan data karena kantor cabang telah beroperasional sejak tahun 1999 sedangkan kantor pusat baru mengeluarkan program perlindungan data pada pertengahan tahun 2023. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kajian serupa dalam literatur sebelumnya belum mengupas program perlindungan data secara menyeluruh. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mendorong untuk secara konsisten serta berkelanjutan menguji kepatuhan terhadap program perlindungan data agar program perlindungan data dapat berjalan secara lebih maksimal salah satunya pengujian berbasis tes poligraf.

Kata kunci : *keamanan informasi, program perlindungan data, organisasi nirlaba, privasi data*

1. PENDAHULUAN

Teori mengatakan tujuan utama perlindungan data adalah untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya. Jika data gagal terlindungi maka akan mempengaruhi reputasi perusahaan yang mengelolanya. Subjek data meragukan kemampuan perusahaan dalam mengelola data. Sehingga dalam prakteknya dilaksanakan berbagai upaya untuk mencapai tujuan utama perlindungan data tersebut. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengerjaan program perlindungan data yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengimplementasikan program perlindungan data.

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang juga meneliti implementasi program perlindungan data. Dasep Suryanto dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam industri ritel [1]. Acep Rohendi dan Dona Budi Kharisma meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam industri finctech [2]. Muhammad Firman Al Ghani meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online [3]. Wanda Dwi Cahyani dan Anita Marianata meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam Kota Bengkulu [4]. Sigit Raharjo dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam rekrutmen online PT ISS Indonesia Cabang Semarang [5]. Patris Nanda Pratama dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di kota Pontianak [6]. Dararida Fandra Mahira dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi yang menggunakan konsep kolaborasi [7]. Rohid Akbar dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada aplikasi mobile banking [8]. Hanafittya dan Sri Walny Rahayu meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada bank pemerintah daerah Aceh [9]. Penelitian Dinda Novika Rahmahdhani dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada industri perbankan [10]. Penelitian Adi Herisasono meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada sistem rekam medis elektronik [11]. Penelitian Muh Rifqy Hidayatullah Arham dan M. Chaerul Risal meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada sistem media sosial [12]. Penelitian Rico Ardi Wijaya dan Mochammad Tanzil Multazam meneliti implementasi perlindungan data pada aplikasi Shopee [13]. Penelitian Bregas Arya Bagaskara, Mohammad Idhom, dan Henni Endah Wahanani menganalisis kerentanan website Dinas Sosial Surabaya [14]. Penelitian Ahmad Tantoni dan Mohammad Taufan Asri Zaen meneliti tentang CCTV pada Rumah Cantik Syifa Masbagik[15].

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi perlindungan data pribadi di berbagai sektor, sebagian besar fokusnya adalah pada bagian tertentu dari suatu perusahaan tanpa menguraikan secara mendalam proses internal dalam mengerjakan program perlindungan data itu sendiri. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menguraikan pengerjaan program perlindungan data pada seluruh bagian dari suatu perusahaan, termasuk bagaimana mengerjakan program tersebut, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana menguji kepatuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan kajian pada implementasi program perlindungan data yang dikeluarkan oleh kantor pusat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi pustaka.

Gambar 1. Metode Penelitian

2.1. Merumuskan Latar Belakang dan Tujuan

Langkah ini membutuhkan pemikiran dari peneliti untuk menggali latar belakang dan tujuan, serta melibatkan studi literatur. Langkah ini menghasilkan latar belakang dan tujuan yang kuat untuk menjadi dasar dalam penelitian ini.

2.2. Studi Pustaka implementasi program perlindungan data yang ada di luar sana

Pada langkah ini mencari tau bagaimana praktik kerja implementasi program perlindungan data yang pernah dipublikasikan di luar sana.

1) Dasep Suryanto dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam industri ritel [1]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya karena industri ritel memiliki perananan penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satu hasil penelitiannya mengharapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

mendorong kebiasaan baru untuk lebih menerapkan perlindungan data pribadi karena di dalamnya mengandung sanksi bagi pelanggar data pribadi.

2) Acep Rohendi dan Dona Budi Kharisma meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam industri finctech [2]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya karena aplikasi fintech umumnya menggunakan data pribadi. Salah satu hasil penelitiannya menuliskan bahwa Indonesia tidak seperti negara lain yang sudah memiliki Badan Komisi Khusus Perlindungan Data Pribadi, pelanggar data pribadi tidak hanya dikenai sanksi administratif tetapi seharusnya juga dikenai sanksi pidana, dan masih rendahnya literasi perlindungan data di kalangan masyarakat Indonesia.
3) Muhammad Firman Al Ghani meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online [3]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya karena marak ditemukannya penyelenggaraan pinjaman online ilegal. Salah satu hasil penelitiannya menuliskan bahwa penyelenggara pinjaman online wajib daftar dan izin OJK namun faktanya dari sekian banyak penyelenggara hanya ditemukan 104 penyelenggara yang terdaftar pada tahun 2021, dan masih rendahnya literasi privasi di kalangan masyarakat Indonesia.
4) Wanda Dwi Cahyani dan Anita Marianata meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam Kota Bengkulu [4]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya karena marak ditemukannya berita kebocoran data di kota Bengkulu. Salah satu hasil penelitiannya menuliskan bahwa kurangnya tindakan preventif dari pihak terkait untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, kurangnya kontrol dari pemerintah terhadap platform digital yang beroperasi di kota Bengkulu, serta masih rendahnya literasi perlindungan data di kalangan masyarakat kota Bengkulu.
5) Sigit Raharjo dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam rekrutmen online PT ISS Indonesia Cabang Semarang [5]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya untuk mengetahui apakah penerapan perlindungan data pribadi pada rekrutmen online PT ISS Indonesia Cabang Semarang telah sesuai dengan UU ITE. Salah satu hasil penelitiannya menuliskan bahwa PT ISS Indonesia Cabang Semarang telah menerapkan perlindungan data pribadi yang selaras dengan UU ITE dan masih perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi di antara kalangan karyawan PT ISS Indonesia Cabang Semarang.
6) Patris Nanda Pratama dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di kota Pontianak [6]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya untuk mengetahui penyebab pelaksanakan perlindungan data pribadi di kota Pontianak belum optimal karena ditemukan adanya penyebarluasan data pribadi pada kota Pontianak. Salah satu hasil penelitiannya menuliskan bahwa kurangnya kepatuhan penyelenggara sistem elektronik khususnya terhadap peraturan perlindungan data, kurangnya kontrol dari pemerintah terhadap penyelenggara sistem elektronik di kota Pontianak, dan masih rendahnya literasi perlindungan data di kalangan Masyarakat kota Pontianak.
7) Dararida Fandra Mahira dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi yang menggunakan konsep kolaborasi [7]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya adalah kebingungan di antara kalangan masyarakat konsumen karena terdapat berbagai lembaga perlindungan konsumen yang dirasa memiliki fungsi yang sama ditambah undang-undang perlindungan data pribadi konsumen yang ada yang dirasa belum mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital yang ada. Salah satu hasil penelitiannya menuliskan bahwa sengketa ecommerce dilaporkan kepada BPSK dan BRTI, sengketa fintech dilaporkan kepada OJK dan BRTI, sengketa ecommerce+fintech dilaporkan kepada BPSK BRTI dan OJK.
8) Rohid Akbar dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada

aplikasi mobile banking [8]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya karena keamanan data merupakan aspek yang sangat penting dalam aplikasi mobile banking disamping kepraktisan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkannya. Salah satu hasil penelitiannya menuliskan model-model yang diberikan oleh industri perbankan untuk melindungi data pribadi seperti device registering, transaction monitoring, dan lainnya disamping langkah-langkah perlindungan data yang dapat digunakan oleh para pengguna aplikasi mobile banking seperti menggunakan OTP, rutin memonitoring transaksi, menghubungi customer service jika mengalami masalah, dan lainnya.

9) Hanafittya dan Sri Walny Rahayu meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada bank pemerintah daerah Aceh [9]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya terdapat beragam peraturan perlindungan data yang dalam praktiknya masih mempunyai celah. Hasil penelitiannya menuliskan bahwa disamping POJK dan UU ITE bank pemerintah daerah Aceh mengeluarkan surat keputusan direksi tentang SOP layanan mobile banking. Selain itu bank pemerintah daerah Aceh juga menerapkan mekanisme-mekanisme untuk melindungi data seperti session timeout, metode-metode autentikasi, transaction monitoring, serta pernyataan tanggungjawab pihak bank pemerintah daerah Aceh manakala terjadi kegagalan perlindungan data baik kegagalan yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri maupun kegagalan yang disebabkan oleh pihak nasabah bank itu sendiri.
10) Penelitian Dinda Novika Rahmahdhani dan kawan-kawan meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada industri perbankan [10]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi yang diberikan oleh perbankan dan pemerintah terhadap layanan mobile banking. Salah satu hasil penelitiannya menuliskan model-model yang diberikan oleh industri perbankan untuk melindungi data pribadi seperti device registering, transaction monitoring, dan lainnya disamping peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.
11) Penelitian Adi Herisasono meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada sistem rekam medis elektronik [11]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan pemerintah terhadap sistem rekam medis elektronik. Hasil penelitiannya menuliskan banyak institusi kesehatan belum menerapkan teknologi keamanan memadai pada sistem rekam medis elektroniknya, banyak tenaga kesehatan belum memahami program perlindungan data, serta kurangnya kontrol dari pemerintah terhadap implementasi program perlindungan data di sektor kesehatan.
12) Penelitian Muh Rifqy Hidayatullah Arham dan M. Chaerul Risal meneliti implementasi perlindungan data pribadi pada sistem media sosial [12]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi yang diberikan oleh pengelola media sosial dan pemerintah terhadap media sosial. Hasil penelitiannya menuliskan belum dicantumkan jenis (delik) tindak pidana dalam sanksi pelanggar data pribadi, urgensi menerbitkan peraturan yang mengatur kelembagaan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, IDPS Kominfo bekerjasama dengan badan/tim untuk meningkatkan keamanan siber di bidang pengelolaan data pribadi.
13) Penelitian Rico Ardi Wijaya dan Mochammad Tanzil Multazam meneliti implementasi perlindungan data pada aplikasi Shopee [13]. Penelitian tersebut dilaksanakan salah satunya untuk mengetahui apakah implementasi perlindungan data pribadi pada aplikasi shopee telah sesuai atau belum sesuai dengan undang-undang nomor 27 tahun 2022. Hasil penelitiannya menuliskan kebijakan privasi aplikasi shopee tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan undang-undang nomor 27 tahun 2022, terdapat

tindakan-tindakan preventif yang perlu dilaksanakan oleh pengelola shopee yang diantaranya adalah mengkaji kembali kebijakan privasi agar lebih sesuai dengan undang-undang nomor 27 tahun 2022 disamping meningkatkan literasi perlindungan data pribadi terhadap para pengguna shopee, terdapat tindakan-tindakan represif yang dapat dilaksanakan oleh para pengguna shopee diantaranya adalah rutin pantau aktivitas transaksi yang mencurigakan untuk segera dilaporkan ke pihak terkait.

2.3 Studi Lapangan Program Perlindungan Data dari Kantor Pusat

Langkah ini mempelajari upaya perlindungan data yang dikeluarkan oleh kantor pusat dengan cara terjun langsung dalam salah satu kantor cabangnya yang berlokasi di Indonesia. Studi lapangan dilaksanakan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Dalam rentang periode tersebut, kantor pusat telah mengeluarkan 4 macam toolkit. Setiap toolkit wajib dikerjakan dalam waktu 2 bulan sampai dengan 3 bulan dan dipresentasikan kembali bagaimana progress pengerjaannya kepada kantor pusat.

2.3.1 Langkah Awal

Peneliti merumuskan Langkah awal dengan cara menggunakan informasi-informasi yang telah dikumpulkan baik dari LMS kantor pusat maupun dari HRDA. Langkah paling awal yang harus dikerjakan adalah mengumpulkan dokumen *userguide* dari masing-masing departemen. *Userguide* baik berupa SOP, ataupun flowchart yang menginformasikan *how to work* departemen. Dari sana dapat diketahui daftar aktivitas pekerjaan departemen yang sedikit banyak berhubungan dengan data sehingga juga dapat sekalian *diassess* segala resiko datanya (data hilang, data rusak/korup, data bocor) serta dikomunikasikan segala temuan-temuan yang masih harus diperbaiki demi terintegrasikannya program perlindungan data dari kantor pusat dalam operasional sehari-hari departemen. Tantangan yang dihadapi peneliti ketika mengerjakan poin ini adalah ketika tidak ada penjelasan tentang apa langkah awal yang harus dikerjakan tetapi malah langsung menjelaskan tentang apa itu Subjek Data, GDPR, DPIA (Data Protection Impact Assessment), Website Compliance, DSAR (Data Subject Access Request).

2.3.2 Toolkit Data Protection

Adapun tampilan toolkit Data Protection seperti dapat dilihat pada gambar berikut

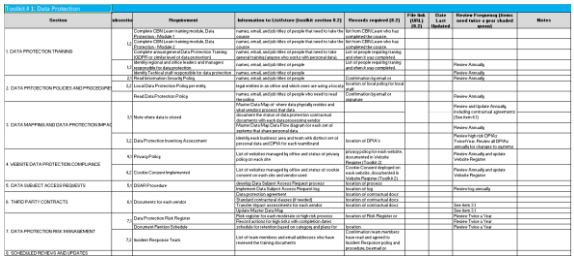

Gambar 2. Toolkit Data Protection

Seperti dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa poin-poin yang harus dikerjakan pada toolkit ini diantaranya adalah:

1) Mengumpulkan daftar departemen yang ada di kantor cabang.
   Peneliti mendapatkan daftar departemen tersebut dari departemen HRDA. Tantangan yang dihadapi peneliti ketika mengerjakan poin ini adalah peneliti mengidentifikasi adanya departemen yang aktivitas pekerjaan departemennya juga sedikit banyak berhubungan dengan data namun tidak dimasukkan ke dalam daftar departemen tersebut.
2) Memberikan materi perlindungan data kepada staff-staff departemen-departemen yang ada di kantor cabang. Kemudian mencatat siapa saja dan kapan staff-staff sudah menerima materi perlindungan data tersebut.
   Peneliti mendapatkan materi perlindungan data tersebut dari LMS kantor pusat. Tantangan yang dihadapi peneliti ketika mengerjakan poin ini adalah karena bahasanya teknis sehingga peneliti menyampaikan setiap poin pada materi tersebut dengan cara menghubungkannya kepada *userguide* yang sudah didapatkan di langkah awal.
3) Mendata Master Data Map departemen
   Peneliti mengerjakan poin ini dengan cara mengisikan ke dalam format dari kantor pusat

tersebut berdasarkan *userguide* departemen yang sudah didapatkan di langkah awal.

4) Mendata DPIA departemen
Peneliti mengerjakan DPIA departemen tersebut dengan cara mengisikan kolom Select Privacy Treatment dimana salah satu poin isiannya adalah data dari departemen hanya boleh didownload dan dikirimkan keluar departemen atas izin manajer departemen. Tantangan yang dihadapi peneliti ketika mengerjakan poin ini adalah ketika terdapat suatu Data Activity Process yang seharusnya diuraikan sampai kepada data atomicnya (misal 2 row atau 3 row) tetapi departemen tidak mengisikannya sampai kepada data atomicnya (misal departemen hanya mengisikan 1 row saja).
5) Mendata bagaimana status pengerjaan pernyataan Kebijakan Privasi dan bagaimana status pengerjaan Pengaturan Cookie pada setiap website yang dikembangkan oleh kantor cabang. Peneliti mengerjakan pernyataan Kebijakan Privasi tersebut sesuai format Kebijakan Privasi dari kantor pusat dimana salah satu poin isiannya adalah data controller tidak menjamin keamanan informasi pribadi yang dikirimkan oleh subjek data kepada data controller dan data controller tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun. Selain itu dalam mengerjakan pernyataan Kebijakan Privasi tersebut, peneliti juga memberikan masukan agar dibuatkan fitur rekonfirmasi terhadap Kebijakan Privasi setiap terjadi perubahan terkait yang dimana fitur rekonfirmasi termasuk dalam salah satu fitur yang diwajibkan oleh PP Nomor 82 Tahun 2012 pasal 26 ayat 2C. Pengaturan Cookie dikerjakan oleh departemen IT menggunakan layanan yang diarahkan oleh kantor pusat (antara Osano atau OneTrust Cookie Pro).
6) Mendata DSAR departemen.
Tantangan yang dihadapi peneliti dalam mengerjakan poin ini adalah memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari saat Subjek Data mengajukan permintaan kepada data controller hingga prosedur untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, dapat terdata dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena jumlahnya yang sangat banyak dan juga terdapat bukti-bukti dokumentasi yang tidak lengkap maka peneliti mengerjakan poin ini dengan cara mengisikan sampelnya saja ke dalam format dari kantor pusat.
7) Mendata Retention Schedule departemen.
Peneliti mengerjakan poin ini dengan cara mengisikan ke dalam format dari kantor pusat tersebut berdasarkan *userguide* departemen yang sudah didapatkan di langkah awal.

2.3.3 Toolkit Website Protection

Adapun tampilan toolkit Website Protection seperti dapat dilihat pada gambar berikut

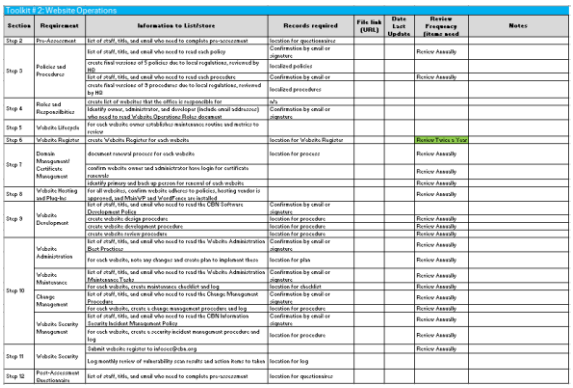

Toolkit # 2: Website Operations

Section	Requirement	Information to Liststore	Records required	File link (URL)	Date Last Update	Review Frequency (times used	Notes
Step 2	Pre-Assessment	list of staff, title, and email who need to complete pre-assessment	location for questionnaire				
Step 3	Policies and Procedures	list of staff, title, and email who need to read such policy	Confirmation by email or signature;			Review Annually	
		create final versions of 5 policies due to local regulations, reviewed by MD	localized policies				
		list of staff, title, and email who need to read such procedures	Confirmation by email or			Review Annually	
		create final versions of 9 procedures due to local regulations, reviewed by MD	localized procedures				
Step 4	Roles and Responsibilities	create list of websites that the office is responsible for	n/a				
		identify owner, administrator, and developer (include email addresses) who need to read Website Operations Roles document	Confirmation by email or signatures				
Step 5	Website Lifecycle	For each website owner establishes maintenance routine and metrics to review					
Step 6	Website Register	create Website Register for each website	location for Website Register			Review Twice a Year	
Step 7	Domain Management/ Conflicts Management	document renewal process for each website	location for process			Review Annually	
		confirm website owner and administrator have login for certificate renewals				Review Annually	
		identify primary and back up person for renewal of each website				Review Annually	
Step 8	Website Hosting and Plugins	for all websites, confirm website adheres to policies, hosting vendor is approved, and WebVPT and WordFence are installed				Review Annually	
Step 9	Website Development	list of staff, title, and email who need to read the CMN Software Development Policy	Confirmation by email or signatures;				
		create website design procedure;	location for procedure;			Review Annually	
		create website development procedure;	location for procedure;			Review Annually	
		create website review procedure;	location for procedure;			Review Annually	
Step 10	Website Administration	list of staff, title, and email who need to read the Website Administration Best Practices	Confirmation by email or signatures;			Review Annually	
		For each website, note any changes and create plan to implement them	location for plan			Review Annually	
	Website Maintenance	list of staff, title, and email who need to read the Website Administration Maintenance Tasks	Confirmation by email or signatures;			Review Annually	
		For each website, create maintenance checklist and log	location for checklist			Review Annually	
	Change Management	list of staff, title, and email who need to read the Change Management Procedure;	Confirmation by email or signatures;			Review Annually	
		For each website, create a change management procedure and log	location for procedure;			Review Annually	
	Website Security Management	list of staff, title, and email who need to read the CMN Information Security Incident Management Policy	Confirmation by email or signatures;			Review Annually	
		For each website, create a security incident management procedure and log	location for procedure			Review Annually	
Step 11	Website Security	Submit website register to infosec@cbs.org				Review Annually	
		Log monthly review of vulnerability scan results and action items to take	location for log				
Step 12	Post-Assessment Questionnaire	list of staff, title, and email who need to complete pre-assessment	location for questionnaire				

Gambar 3. Toolkit Website Operations

Dalam mengerjakan toolkit Website Operations ini, peneliti hanya mengerjakan poin-poin utamanya saja yaitu sebagai berikut:

1) Mendata website register
Peneliti mengerjakan poin ini dengan cara mengisikan ke dalam format dari kantor pusat. Pada Website Register ini diisikan informasi-informasi terkait website yang dikembangkan oleh kantor cabang diantaranya adalah alamat URL website, siapa owner website, siapa admin website, siapa developer website, kapan tanggal kadaluarsa sertifikat website.
2) Mendata Hosting Approval
Arahan dari kantor pusat adalah untuk menggunakan hosting yang disediakan oleh Pantheon atau WPEngine sehingga jika kantor cabang sudah atau berencana menggunakan hosting dari penyedia lainnya maka harus mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat dengan cara mengisikan formulir tersebut.

3) Menjawab segala pertanyaan dari kantor cabang terkait Administrasi Website
Peneliti mengerjakan poin ini dengan cara menjawab segala pertanyaan dari kantor cabang terkait Administrasi Website. Salah satu arahan dari kantor pusat adalah agar selain menerapkan best practice dalam Administrasi Website, juga menginstal layanan-layanan pendukung seperti Varonis, MainWP, Wordfence sehingga juga dapat dikontrol oleh kantor pusat.
4) Menjawab segala pertanyaan dari kantor cabang terkait Vulnerability Scanner
Peneliti mengerjakan poin ini dengan cara menjawab segala pertanyaan dari kantor cabang terkait Vulnerability Scanner. Arahan dari kantor pusat terkait poin ini salah satunya adalah agar setiap bulannya menscanning setiap website yang sudah didatakan ke dalam Website Regsiter sebelumnya dan memastikan hasil scanning tidak mengandung *vulnerability* kategori HIGH maupun *vulnerability* kategori MEDIUM.
5) Mendata Change Management Log
Tantangan yang dihadapi peneliti dalam mengerjakan poin ini adalah memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari saat Client mengajukan permintaan perubahan layanan kepada IT hingga prosedur untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, dapat terdata dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena jumlahnya yang sangat banyak dan juga terdapat bukti-bukti dokumentasi yang tidak lengkap (terutama pada metode pengembangan perangkat lunaknya yang belum mengintegrasikan sistem versioning) maka peneliti mengerjakan poin ini dengan cara mengisikan sampelnya saja.

2.3.4 Toolkit InfoSec

Adapun tampilan toolkit InfoSec seperti dapat dilihat pada gambar berikut

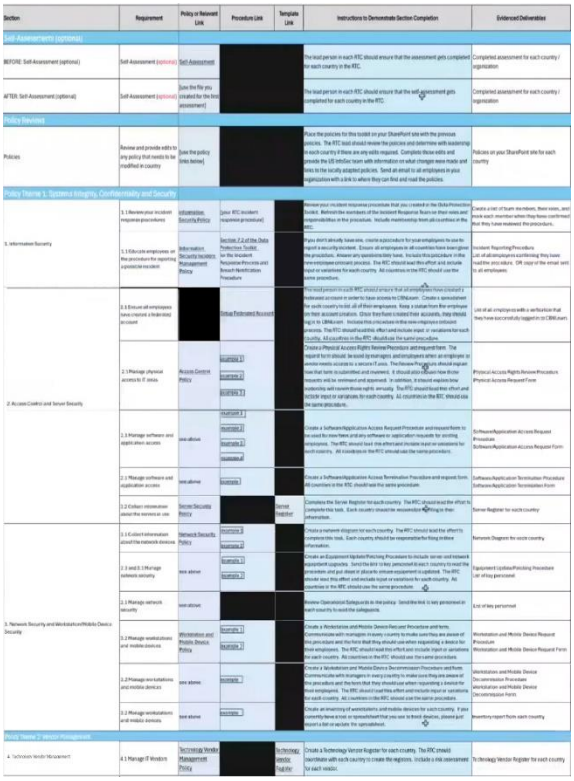

Gambar 4. Toolkit InfoSec

Dalam mengerjakan toolkit InfoSec ini, peneliti hanya mengerjakan poin-poin utamanya saja yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan materi perlindungan data kepada staff-staff departemen-departemen yang ada di kantor cabang. Kemudian mencatat siapa saja dan kapan staff-staff sudah menerima materi perlindungan data tersebut.
Peneliti mendapatkan materi perlindungan data tersebut dari LMS kantor pusat. Tantangan yang dihadapi peneliti ketika mengerjakan poin ini adalah karena bahasanya teknis sehingga peneliti menyampaikan setiap poin pada materi tersebut dengan cara menghubungkannya kepada *userguide* yang sudah didapatkan di langkah awal.
2) Mengumpulkan dokumen SOP IT
Poin ini salah satunya menuntut agar seluruh aktivitas pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur SOP. Salah satu tantangan yang dihadapi peneliti dalam mengerjakan ini adalah penyusunan SOP IT seharusnya disusun oleh departemen IT namun diserahkan kepada departemen Legal sehingga dalam kondisi tersebut peneliti

hanya dapat memberikan informasi berdasarkan observasi langsung terhadap aktivitas operasional IT yang selanjutnya dijadikan dasar oleh departemen Legal dalam merumuskan narasi SOP IT terkait.

3) Mengumpulkan topologi jaringan
4) Mendatakan vendor-vendor IT yang digunakan oleh kantor cabang

Peneliti mengerjakan poin ini dengan cara mengisikan data ke dalam format dari kantor pusat. Tantangan yang dihadapi peneliti ketika mengerjakan poin ini salah satunya adalah belum adanya contoh format laporan risk assessment vendor sehingga laporan risk assessment dibuat dengan cara mengisikan poin-poin sebagaimana petunjuk dalam worksheet *instructions* seperti bagaimana praktek perlindungan data yang diadopsi oleh vendor dan bagaimana kesesuaiannya terhadap GDPR.

2.3.5 Toolkit Antivirus

Adapun tampilan toolkit Antivirus seperti dapat dilihat pada gambar berikut

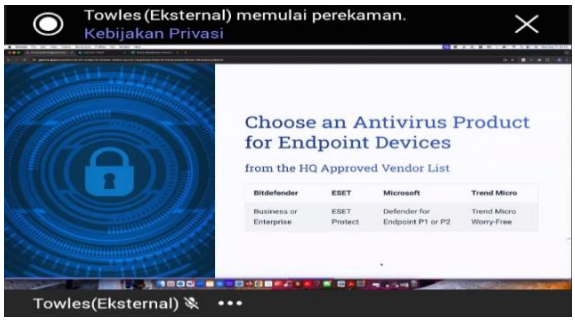

Gambar 5. Toolkit Antivirus

Dalam mengerjakan toolkit Antivirus ini, peneliti hanya mengerjakan poin-poin utamanya saja yaitu sebagai berikut:

1) Antivirus dikerjakan oleh departemen IT dengan mengikuti petunjuk instalasi dari kantor pusat
2) Menggunakan antivirus yang diarahkan oleh kantor pusat (antara Bitdefender, ESET, Microsoft Defender, atau Trend Micro)
3) Menginstal antivirus melalui tools device management yang terhubung dengan device-device staff-staff departemen
4) Melaksanakan konfigurasi sedemikian agar antivirus yang sedang scanning tidak mengganggu performance device-device staff-staff editor

2.4 Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program perlindungan data yang dikeluarkan oleh kantor pusat, termasuk dokumen toolkit, instruksi pengerjaan, hasil pengerjaan, dan presentasi progres pengerjaan.

Data tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif untuk menunjukkan bagaimana program perlindungan data dikerjakan. Selanjutnya, dilaksanakan perbandingan dengan studi literatur-literatur yang membahas tentang praktik pengerjaan program perlindungan data di berbagai sektor.

Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta potensi perbaikan dalam mengerjakan program perlindungan data, sehingga dapat disusun kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta peraturan perlindungan data yang berlaku di Indonesia.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam subab ini, peneliti menyajikan hasil penilaian terkait perbandingan terhadap praktik kerja mengimplementasikan program perlindungan data yang pernah dipublikasikan di luar sana. Penilaian tersebut disajikan ke dalam tabel berikut.

TABEL I. PENILAIAN

No	Makalah	Penilaian
1	"Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel "Tinjauan Terhadap Kepatuhan dan Dampaknya Pada Konsumen" oleh Dasep Suryanto dan	Menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam program perlindungan data pribadi. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan industri retail) dan salah satu yang dikerjakan adalah hal tersebut.

	kawan-kawan [1]	
2	"Personal data protection in fintech: A case study from Indonesia" oleh Acep Rohendi dan Dona Budi Kharisma [2]	Menunjukkan bahwa sangat pentingnya peningkatan literasi perlindungan data. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan industri fintech) dan salah satu yang dikerjakan adalah meningkatkan literasi (melalui CBN Learn).
3	"Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online" oleh Muhammad Firman Al Ghani [3]	Menekankan peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban pemberi pinjaman dalam melindungi data pribadi dan menindak tegas penyelenggaran pinjaman online illegal serta meningkatkan literasi agar masyarakat tidak mudah terjerat oleh pinjaman online ilegal. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan penyelenggara layanan pinjaman online) dan salah satu yang dikerjakan adalah meningkatkan literasi (melalui CBN Learn) dan pastinya mengharapkan pemerintah menindak tegas terhadap pelanggaran data pribadi.
4	"Analisis Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Kota Bengkulu: Studi Implementasi UU PDP Dalam Era Digital" oleh Wanda Dwi Cahyani dan Anita Marianata[4]	Menunjukkan pentingnya meningkatkan keamanan dengan menggunakan teknologi yang lebih muktahir serta meningkatkan literasi perlindungan data. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan badan pemerintah) dan salah satu yang dikerjakan adalah meningkatkan literasi (melalui CBN Learn) dan menggunakan teknologi terkait keamanan (Vulnerability Scanning, Antivirus, dan lainnya).
5	"Tinjauan Perlindungan Data Pribadi Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Online Karyawan Pada Perseroan Terbatas ISS Indonesia Cabang Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik" oleh Sigit Raharjo, Ismiyanto, dan Muhammad Muhtarom [5]	Memperlihatkan bagaimana pengimplementasian program perlindungan data pada rekrutmen online PT ISS Indonesia Cabang Semarang. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan PT) dan yang dikerjakan adalah seluruh departemen (tidak hanya satu dua departemen).
6	"Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Kota Pontianak)" oleh Patris Nanda Pratama, Hamdani, Tri	Menekankan semua pihak harus berkolaborasi agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara maksimal, penyelenggara sistem elektronik meningkatkan kepatuhannya

	Dian Aprilsesa [6]	terhadap peraturan perlindungan data, pemerintah meningkatkan kontrolnya terhadap penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat meningkatkan pengetahuan/kewas padaannya dalam melindungi data pribadinya. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional dan salah satu yang dikerjakan adalah meningkatkan literasi (melalui CBN Learn) dan pastinya mengharapkan semua pihak berkolaborasi.
7	"Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept" oleh Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita, dan Lisa Nur Azizah [7]	Menekankan pentingnya melaporkan sengketa terkait terhadap lembaga terkait. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional dan salah satu yang dikerjakan adalah Toolkit Data Protection yang salah satunya tentang mengharuskan Incident Response Team melaporkan sengketa terkait terhadap lembaga terkait.
8	"Analisis Keamanan Data Pada Aplikasi Mobile Banking" oleh Rohid Akbar dan Muhammad Irwan Padli Nasution [8]	Memperlihatkan model-model yang diberikan oleh industri perbankan untuk melindungi data pribadi dan langkah-langkah perlindungan data yang dapat digunakan oleh para pengguna aplikasi mobile banking. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan bank) dan salah satu yang dikerjakan adalah menggunakan model-model perlindungan data yang ditetapkan oleh kantor pusat untuk dikerjakan oleh kantor-kantor cabang.
9	"Analisis Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Pada Nasabah Pengguna Produk Layanan Mobile Banking Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh" oleh Hanafittya dan Sri Walny Rahayu [9]	Membahas SOP layanan mobile banking, mekanisme-mekanisme perlindungan data, dan pernyataan tanggungjawab pihak bank pemerintah daerah Aceh. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan bank) dan salah satu yang dikerjakan adalah SOP dan mekanisme-mekanisme perlindungan data.
10	"Perlindungan Data Privasi Yang Dilakukan Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking" oleh Dinda Novika Rahmahdhani, Muhammad Irwan Padli Nasution, dan Sri Suci Ayu Sundari [10]	Memperlihatkan model-model yang diberikan oleh industri perbankan untuk melindungi data pribadi disamping peraturan pemerintah yang mengatur perlindungan data pribadi. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan bank) dan salah satu yang dikerjakan

		adalah menggunakan model-model perlindungan data yang ditetapkan oleh kantor pusat untuk dikerjakan oleh kantor-kantor cabang.
11	"Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik" oleh Adi Herisasono [11]	Membahas pentingnya menerapkan teknologi keamanan yang memadai pada sistem rekam medik elektronik, semua pihak harus berkolaborasi agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara maksimal, serta meningkatkan literasi perlindungan data di antara kalangan tenaga kesehatan. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan industri medis) dan salah satu yang dikerjakan adalah meningkatkan literasi (melalui CBN Learn), menggunakan model-model perlindungan data yang ditetapkan oleh kantor pusat, dan pastinya mengharapkan semua pihak harus berkolaborasi.
12	"Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial" Oleh Muh Rifqy Hidayatullah Arham dan M. Chaerul Risal [12]	Membahas IDPS Kominfo bekerjasama dengan badan/tim untuk meningkatkan keamanan siber di bidang pengelolaan data pribadi. Penelitian kami juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan penyelenggara media sosial) dan salah satu yang dikerjakan adalah pastinya mengharapkan semua pihak harus berkolaborasi
13	"Analisis Implementasi Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi Belanja Online Shopee" oleh Rico Ardi Wijaya dan Mochammad Tanzil Multazam [13]	Membahas pentingnya mengkaji kembali kebijakan privasi serta meningkatkan literasi perlindungan data terhadap para pengguna shopee. . Kami melaksanakan penelitian pada salah satu perusahaan nonprofit multinasional (bukan e-commerce) dan salah satu yang dikerjakan adalah meningkatkan literasi perlindungan data (melalui CBN Learn) dan kebijakan privasi.

Dari tabel perbandingan terhadap penelitian-penelitian tersebut, didapatkan temuan-temuan yang juga sejalan dengan hasil penelitian kami. Perlindungan data pribadi melibatkan kerja sama yang aktif antara semua pihak baik pemerintah, pengelola data pribadi, maupun pemilik data pribadi. Selain itu literasi tentang perlindungan data pribadi harus terus ditingkatkan agar semua pihak terus memahami hak dan tanggungjawabnya. Semua pihak harus mematuhi peraturan perlindungan data pribadi (Regulasi, SOP, Teknologi Tepat Guna, Mekanisme Respon Insiden/*Breach*, atau apapun itu bentuknya) dan secara konsisten menguji kepatuhan dirinya sendiri terhadap peraturan perlindungan data. Baik pada penelitian kami maupun penelitian-penelitian tersebut belum ada yang menyoroti

tugas-tugas tambahan lainnya yang ditugaskan oleh perusahaan yang juga harus dikerjakan oleh petugas perlindungan data di luar tugas utamanya sebagai petugas perlindungan data. Apakah dengan mengerjakan tugas tambahan tersebut dapat meningkatkan efektivitas atau sama sekali tidak mempengaruhi efektivitas tugas utama sebagai petugas perlindungan data. Namun yang paling utama dari semuanya itu, semua pihak termasuk organisasi pengelola data pribadi harus merencanakan semuanya tersebut demikian rupa dan secara konsisten serta berkelanjutan menguji pelaksanannya apakah masih sesuai dengan rencana tujuan utama program perlindungan data pribadi.

4 Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi perlindungan data baik dari kantor pusat maupun dari luar sana yang pernah dipublikasikan peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1) Penelitian kami telah memperlihatkan bagaimana praktik kerja mengimplementasikan program perlindungan data mulai dari hal memberikan materi perlindungan data dari kantor pusat, meng*enforce* agar semua pekerjaan harus terdokumentasikan dan sesuai prosedur, menerapkan best practice dalam administrasi website, hanya mengadopsi teknologi yang telah disetujui oleh kantor pusat, sampai kepada hal melaksanakan pengujian secara insidentil maupun terjadwal terhadap program perlindungan data yang telah diterapkan di setiap kantor cabangnya. Program perlindungan data yang dari kantor pusat tersebut tidak hanya untuk satu departemen tetapi untuk semua departemen yang ada di kantor cabang.
2) Selama masih terdapat temuan-temuan semisal tidak lengkapnya bukti-bukti dokumentasi pengerjaan permintaan Subjek Data, interaksi sosial yang menyebabkan tidak sengaja mengungkapkan data pribadi Subjek Data, dan temuan-temuan lainnya terkait perlindungan data menandakan bahwa data controller belum menjalankan program perlindungan data secara maksimal. Karena dalam memberikan perlindungan terhadap data tidak cukup hanya menerapkan best practice pada sisi teknisnya (Vulnerability Scanner, Enkripsi/Dekripsi, Device/Transaction Monitoring, Autentikasi Multi Faktor, Secure Coding, Anti Malware), tetapi juga harus diimbangi dengan menerapkan best practice pada sisi non-teknisnya dan juga mengerjakannya secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka:

[1] D. Suryanto and S. Riyanto, “Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel "Tinjauan Terhadap Kepatuhan dan Dampaknya Pada Konsumen,” *Veritas*, vol. 10, no. 1, pp. 121–135, 2024.

[2] A. Rohendi and D. B. Kharisma, “Personal data protection in fintech: A case study from Indonesia,” *J. Infrastructure, Policy Dev.*, vol. 8, no. 7, pp. 1–11, 2024, doi: 10.24294/jipd.v8i7.4158.

[3] M. F. Al Ghani, “Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online,” *Dig. J. Jurisprud. Legisprudence*, vol. 3, pp. 38–58, 2022.

[4] W. D. Cahyani and A. Marianata, “Analisis Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Kota Bengkulu : Studi Implementasi UU PDP Dalam Era Digital,” *J. Kaji. Huk. Dan Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 623–626, 2024.

[5] S. Raharjo, Ismiyanto, and M. Muhtarom, “Tinjauan Perlindungan Data Pribadi Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Online Karyawan Pada Perseroan Terbatas ISS Indonesia Cabang Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 6, pp. 2943–2952, 2024.

[6] P. N. Pratama, Hamdani, and T. D. Aprilsesa, “Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Kota Pontianak),” *Tanjungpura Leg. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 145–165, 2023, [Online]. Available: https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia.

[7] D. F. Mahira, E. Yofita, and L. N. Azizah, “Consumer Protection System (CPS):

Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept Dararida," *LEGISLATIF*, vol. 3, no. 2, pp. 287–302, 2020, doi: 10.48175/ijarsct-13062.

[8] R. Akbar and M. I. P. Nasution, "Analisis Keamanan Data Pada Aplikasi Mobile Banking," *J. Sharia Econ. Sch.*, vol. 2, no. 2, pp. 79–83, 2023, [Online]. Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.12527995.

[9] Hanafittya and S. W. Rahayu, "Analisis Perlindungan Kerahasiaan DataPribadi Pada Nasabah Pengguna Produk Layanan Mobile Banking Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh," *J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Keperdataan*, vol. 5, no. 2, pp. 328–337, 2021.

[10] D. N. Rahmahdhani, M. I. P. Nasution, and S. S. A. Sundari, "Perlindungan Data Privasi Yang Dilakukan Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking," *JUEB J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 88–96, 2023, doi: 10.57218/jueb.v2i2.693.

[11] A. Herisasono, "Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik," *urnal Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 12, pp. 4677–4681, 2024, doi: 10.56338/jks.v7i12.6620.

[12] M. R. H. Arham and M. C. Risal, "Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial," *J. Al Tasyri'iyyah*, vol. 3, no. 2, pp. 109–119, 2023.

[13] R. A. Wijaya and M. T. Multazam, "Analisis Implementasi Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi Belanja Online Shopee," *UMSIDA Prepr. Serv.*, pp. 1–8, 2023, [Online]. Available: https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/view/3457.

[14] B. Arya Bagaskara, M. Idhom, and H. Endah Wahanani, "Pengujian Website Dinas Sosial Surabaya Menggunakan Metode Penetration Testing Dan Owasp Top 10," *J. Inform. Rekayasa Elektron.*, vol. 8, no. 1, pp. 40–50, 2025, [Online]. Available: http://e-journal.stmiklombok.ac.id/index.php/jire ISSN.2620-6900.

[15] A. Tantoni and M. T. A. Zaen, "Sistem Keamanan Pemantauan CCTV Online Berbasis Android Pada Rumah Cantika Syifa Masbagik," *J. Inform. Rekayasa Elektron.*, vol. 3, no. 1, pp. 40–47, 2020.